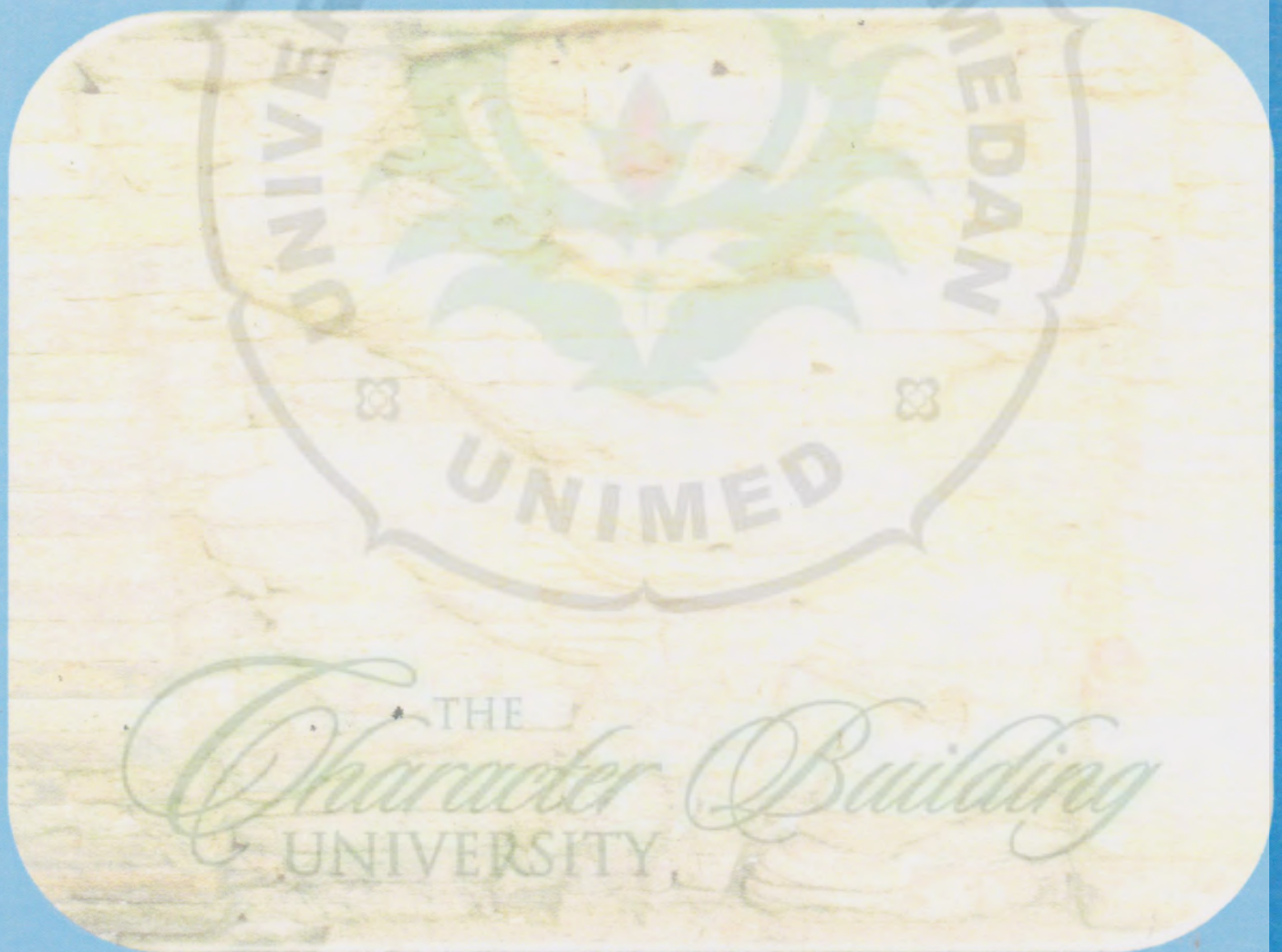


JANGAN SEKALI-SEKALI MELUPAKAN SEJARAH

JASMERAH

JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
JL. Wiliam Iskandar, Pasar V, Medan Estate, Medan 20221
Telp. (061) 6625973, 6613276 Fax. (061) 6614002
Email : jurnaljasmerah@rocketmail.com



Relief di Candi Bahal I
Dok. Jurusan, Pend. Sejarah 2014

Volume	Nomor	Halaman	Tahun Terbit	ISSN
10	5	1-116	September 2014	0215-2096

ISSN : 0215-2096

JAS MERAH

Jurnal Pendidikan Sejarah

Pelindung:

Rektor Universitas Negeri Medan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Pemimpin Redaksi:

Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah

Wakil Pemimpin Redaksi:

Drs. Yushar Tanjung, M.Si

Sekretaris Redaksi:

Dra. Hafnita SD Lubis, M.Si

Dewan Redaksi:

Dr. Phil Ichwan Azhari, MS

Dr. Hidayat, M.Si

Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd

Dra. Flores Tanjung, M.A

Tappil Rambe, S.Pd, M.Si

Administrasi:

Syahrul Nizar Saragih, M.A, M.Hum

Pulung Sumantri, S.Pd, M.Si

Alamat Redaksi:

Jurusan Pendidikan Sejarah

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Medan

Jl. Willem Iskandar, Pasar V. Medan Estate, Medan, 20221

Telp. (061) 6625973, 6613276

Fax: (061) 6614002

Keaslian tulisan menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi berhak mengubah tulisan tanpa mengubah maknanya

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Multikulturalisme dan Dinamika Masyarakat Oleh: Lukita Ningsih & Pulung Sumantri.....	1
Tinjauan History Palas Si Pitu Ruang Sebagai Wujud Kebudayaan Megalitik Di Desa Ajinembah, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo Oleh: Lister Eva Simangunsong & Albred Sembiring.....	17
Terbentuknya Pemukiman Kotarih di Kabupaten Serdang Bedagai Oleh: Yushar & Ayu Indriani	29
Sejarah Kampung Kebayakan Oleh: Tappil Rambe & Rizky Niara	40
Peranan Kejeruan Bingai Terhadap Keberadaan Kesultanan Langkat Tahun 1824-1896 Abad ke XIX Oleh: Ponirin & Devita Syahfitri	53
Kerja Paksa di Batu Lubang pada Masa Penjajahan Belanda di Kabupaten Tapanuli Tengah (1930-1942) Oleh: Hafnita S D Lubis & Josrai Sibagariang	69
Pengaruh Pemerintahan Belanda Terhadap Perubahan Sistem Kekuasaan Raja-Raja Pakpak di Sumbul Pegagan (1902-1942) Oleh: Ika Purnama Sari & Idawati Lumban Gaol	84
Perlawanan-Perlawanan Masyarakat Lokal Tebing Tinggi Terhadap Tentara Jepang Pasca Kemerdekaan Oleh: Ricu Sidiq & Kiki Susanti	95

MULTIKULTURALISME DAN DINAMIKA MASYARAKAT

Oleh :
Lukitaningsih
Pulung Sumantri

Abstrak

Sangat sulit merumuskan secara tepat pengertian multikulturalisme dalam satu bingkai telaah ilmiah. Berbagai pendapat mewarnai pemikiran untuk melahirkan gagasan yang tepat tentang multikulturalisme. Hal ini menunjukkan bahwa diskursus tentang tema ini belum tuntas. Multikulturalisme yang berakar dari tiga kata; multi, kultur dan isme secara sederhana adalah pemikiran pandangan ajaran bahwa sejatinya kultur itu adalah keberagaman sehingga tidak jarang keberagaman ini menimbulkan perilaku yang akomodatif, asosiatif, koperatif, kompetitif dan bahkan dapat memicu terjadinya konflik. Keberagaman juga mendorong tumbuh dan berkembangnya dinamika dalam masyarakat yang bermuara pada terjadinya perubahan-perubahan. Oleh karena itu keberagaman adalah merupakan sunnatullah.

Kata kunci : Multikulturalisme, dinamika masyarakat

THE
Character Building
UNIVERSITY

PENDAHULUAN

Kultur (budaya) secara umum dikatakan sebagai hasil cipta, karsa dan karya manusia (Koentjaraningrat, 1975:11). Ini berarti ia dilandasi oleh pikiran, sikap dan tindakan yang menjadi kebiasaan dalam komunitas bersama. Karena itu, budaya memiliki batas-batas geografis, etnis, bahkan nilai-nilai agamis yang bisa saja berbeda bahkan bertentangan antara satu dengan lainnya. Globalisasi dan keterbukaan serta urbanisasi dan migrasi masyarakat telah pula mendukung pertemuan berbagai sistem kultural. Bagi segelintir orang, pertemuan antar kultural ini akan membawa *kemudharatan*, namun bagi segelintir lainnya, dengan *legowo* menerimanya sebagai proses evolusi budaya dan masyarakat. Sebagai sikap moderat dan optimis, kita dapat mengakui bahwa pertemuan antar sistem kultural, selain memberikan efek-efek negatif juga mengandung unsur-unsur yang sangat positif. Misalnya, pertemuan antar keyakinan agama, secara negatif akan menghasilkan benturan antar agama, sedangkan secara positif memberikan wawasan, pengalaman, dan berbagi kerjasama dalam membangun masyarakat, karena pembangunan itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik.

Jadi, kemajemukan dan perbedaan di tengah-tengah masyarakat di samping dapat memberikan keindahan, manfaat, dan kasih sayang, tetapi juga di sisi lain mengandung potensi konflik dan penghancuran, kebencian dan peperangan. Karena itu, agar kemajemukan kultural di masyarakat tidak menimbulkan kesan negatif dan merusak, maka perlu dirumuskan suatu pengertian yang lebih rasional tentang multikulturalisme itu merupakan pendorong timbulnya dinamika dalam masyarakat sehingga kita dapat menentukan kebijakan dalam berbuat dalam masyarakat yang berbeda sehingga tampilan yang dominan adalah kearifan dalam menyikapi perbedaan yang ada.

MAKNA MULTIKULTURALISME

Salah satu kesulitan dalam membicarakan multikulturalisme adalah persoalan makna dan defenisinya, padahal pemaknaan penting sebagai batasan pembicaraan. Jika pembicaraan tidak dibatasi maka akan terjadi campur aduk yang tentunya akan menghilangkan signifikansi pembicaraan dan berakhir pada pengaburan persoalan. Jika kita membaca beragam literatur dari pengusung multikulturalisme, maka kita menemukan

sederetan pemaknaan yang beragam bahkan sebagian terlihat cenderung untuk menghindari mendefinisikannya.

Hal ini dapat saja karena anggapan kejelasan makna multikulturalisme itu sendiri sehingga lebih mudah merujuk pada faktanya daripada konsepnya, atau juga karena multikulturalisme mengindikasikan keterbukaan sehingga maknanya harus tetap terbuka dan tak bisa dibakukan, atau pula, seperti kata sebagian orang karena “ketidakjelasan” adalah ciri postmodernisme yang menjadi topanan multikulturalisme. Apapun itu alasannya, yang jelas makna multikulturalisme ternyata juga bersifat multi (beragam).

Keragaman itu, setidaknya disebabkan pula oleh multi interpretasinya makna *culture* (budaya) itu sendiri, yang merupakan kata kunci dari multikulturalisme. Jenks (2008) telah menyelidiki beragam pemikiran tentang kebudayaan baik dari perspektif sosiologis maupun antropologis, baik berhubungan dengan struktur sosial, tindakan sosial, simbolisme, materialisme budaya, stratifikasi budaya, intepretatif budaya dan beragam pandangan dari tokoh-tokoh utama kebudayaan. Penelusuran Jenks membawa kita kepada pembahasan budaya yang nyaris tak berujung. Di sisi lain, Kluckhon dalam bukunya *Mirror for Man* mencoba menganalisis konsep kebudayaan ini dengan panjang lebar yang kemudian merumuskan kebudayaan sebagai : (1) “keseluruhan cara hidup suatu masyarakat”; (2) “warisan sosial yang diperoleh individu dari kelompoknya”; (3) “Suatu cara berpikir, merasa dan percaya”; (4) “suatu abstraksi dari tingkah laku”; (5) “suatu teori pada pihak antropolog tentang cara suatu kelompok masyarakat nyatanya bertingkah laku; (6) “suatu gudang untuk mengumpulkan hasil belajar”; (7) “seperangkat orientasi-orientasi standar pada masalah-masalah yang sedang berlangsung”; (8) “tingkah laku yang dipelajari”; (9) suatu mekanisme untuk penataan tingkah laku yang bersifat normative; (10) “seperangkat teknik untuk menyesuaikan baik dengan lingkungan luar maupun dengan orang-orang lain”; (11) “suatu endapan sejarah”. (Geertz, 1992:4-5). Sedangkan Edward B. Tylor menjelaskan bahwa budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Tilaar, 2002:39).

Belajar dari kompleksitas dan ambiguitas makna kultur dan multikulturalisme tersebut maka Bikhu Parekh dalam bukunya *National Culture and Multiculturalism*, membedakan lima jenis multikulturalisme. *Pertama*, multikulturalisme isolasionis yang mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup

secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. **Kedua**, multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. **Ketiga**, multikulturalis otonomis, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan mengangankan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Kepedulian pokok kelompok-kelompok kultural terakhir ini adalah untuk mempertukarkan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok yang dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok dapat eksis sebagai mitra sejajar. **Keempat**, multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok tidak terlalu peduli dengan kehidupan cultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. **Kelima**, multikulturalisme cosmopolitan, yakni paham yang berusaha menghapuskan batas-batas cultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Sebaliknya, mereka secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen intercultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan cultural masing-masing. Para pendukung multikulturalisme jenis ini, yang sebagian besar adalah intelektual diasporik dan kelompok-kelompok liberal yang memiliki kecenderungan postmodernis memandang seluruh budaya sebagai *resources* yang dapat mereka pilih dan ambil secara bebas (Mahfud, 2009:93-95)

Jadi, tidak mudah memetakan makna multikulturalisme. Bahkan H. A. R Tilaar yang dianggap memelopori gerakan multikulturalisme di Indonesia ini, lebih memilih menjelaskan historisitas dan multi interpretasi perkembangan makna multikulturalisme dari satu tahapan kepada tahapan yang lain (gelombang pertama, kedua, dan seterusnya), dari satu hubungan konsepsi kepada hubungan konsepsi yang lain (sosial, budaya, politik, ekonomi, filosofis dan lainnya), dari satu pandangan pemikir kepada pandangan pemikir yang lain (Taylor, Fuller, Reich, Banks, dan lainnya), dan dari satu negara kepada negara yang lain (Amerika, Jerman, Inggris, Kanada, Australia, Afrika Selatan). Sehingga Tilaar mengatakan mendefinisikan multikulturalisme bukanlah hal yang mudah (Tilaar, 2004: 82 dan 175). Hal ini dijamin juga oleh Zakiyuddin Baidhawiy yang menyebutkan bahwa multikulturalisme adalah istilah yang samar, ambivalen, dan *debatable* (Baidhawiy, 2005:2). Singkatnya, ada kompleksitas dan ambiguitas makna

multikulturalisme. Jika di negeri asalnya, seperti Kanada, Amerika Serikat Inggris, atau Jerman istilah multikulturalisme masih mengalami kompleksitas dan ambiguitas yang serius, maka bagaimana pula dengan nasibnya di Indonesia yang 'mengimport' konsepsi multikulturalisme tersebut?.

Begitulah multi interpretasi terhadap multikulturalisme yang "mengaburkan" jalinan maknanya. Namun, "ketidakjelasan defenisi" tidak lantas menghentikan pembahasan kita tentang multikulturalisme, sebab dibalik selubung ambiguitasnya terdapat benang merah yang menyatukannya ke-multi-annya, atau dalam bahasa agama (Islam), dibalik yang *mutasyabihat* (samar-samar) ada jalur yang *muhkamat* (jelas). Dan yang *muhkamat* dari multikulturalisme adalah *recognition* (pengakuan). Inilah yang digaungkan oleh Charles Taylor (1994) dalam karyanya *Multiculturalism, Examining the Politics of Recognition*. Dari *recognition* inilah terhubungkan sekian banyak konsepsi tentang multikulturalisme seperti *different* (keberbedaan), *equality* (kesederajatan), *equity* (keadilan), dan lainnya.

Dengan panduan tersebut, maka Tilaar menganalisis bahwa sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi, setiap manusia atau kelompok masyarakat mempunyai hak untuk hidup dan memelihara kebudayaannya sendiri. Pengakuan terhadap kebudayaan yang berjenis-jenis di dalam suatu negara-bangsa (*nation state*) telah merupakan suatu cara hidup berbangsa yang modern. Inilah yang dikenal sebagai multikulturalisme. Multikulturalisme modern di dalam dunia yang terbuka dalam era globalisasi bersifat terbuka dan melihat keluar (*outward looking*). Multikulturalisme yang *outward looking* berarti seseorang mempunyai kesadaran serta kebanggaan memiliki dan mengembangkan budaya komunitasnya sendiri namun demikian dia akan hidup berdampingan secara damai bahkan saling bekerjasama dan saling menghormati dengan tetangganya yang memiliki budaya lain (Tilaar, 2007: 15 dan Tilaar, 2004) Karena itu pula, Parsudi Suparlan mengemukakan defenisi multikulturalisme sebagai sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan (Suparlan, 2002:98). Sebagai ideologi, multikulturalisme bagi Suparlan harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Karena multikulturalisme itu adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia dan melihat kebudayaan

sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, yang mana kebudayaan itu operasional melalui pranata-pranata sosial (Suparlan, 2002:99-100).

Dengan begitu, multikulturalisme yang tersusun dari tiga kata, *multi* yang berarti majemuk atau beragam atau plural; *kultur* yang biasa diterjemahkan menjadi budaya; dan *isme* yakni paham atau ideologi yang dianut. Dengan demikian, secara sederhana, multikulturalisme bermakna paham yang menerima kemajemukan budaya. Dengan begitu, Multikulturalisme mengagungkan kebersamaan dalam keragaman; kesejajaran dalam perbedaan; keseimbangan dalam keanekaan; atau juga rasa saling memahami dan menerima realitas perbedaan kultural yang ada.

ASUMSI-ASUMSI DASAR MULTIKULTURALISME

1. Manusia makhluk sosial (bermasyarakat)

Manusia adalah makhluk social (*zoon politicon*) adalah dictum kuno yang diterima secara umum oleh para pemikir di dunia ini. Artinya manusia tidak dapat hidup sendirian dalam mengarungi kehidupan yang kompleks ini. Dia membutuhkan orang lain (komunitas) sebagai mitra dalam menopang hidup dan kehidupannya, meregenerasi kehidupannya, dan tentunya mengembangkan seluruh potensi yang ada pada dirinya. Sederhananya, manusia adalah makhluk yang membutuhkan hidup bermasyarakat. Dari beragam tulisan sosiologis-antropologis dictum manusia sosial ini tak mungkin dihindari, karena itu manusia harus mengaktualisasikan kehidupannya dalam suatu bentuk kemasyarakatan. Murtadha Muthahhari (1990:16) dengan sangat baik mengemukakan jiwa kemasyarakatan manusia ini yang bersumber dari fitrah manusia yang khas. Karena itu meskipun binatang dan tumbuhan hidup secara berkelompok juga tetapi tidak disebut bermasyarakat. Menurut Muthahhari, kehidupan manusia bersifat kemasyarakatan, artinya, bahwa secara fitri ia bersifat kemasyarakatan. Di satu pihak, kebutuhan, keuntungan, kepuasan, karya dan kegiatan manusia, pada hakikatnya, bersifat kemasyarakatan, dan system kemasyarakatannya akan tetap maujud selama ada pembagian kerja, pembagian keuntungan dan rasa saling membutuhkan dalam suatu perangkat tertentu tradisi dan system. Di pihak lain, gagasan-gagasan, ideal-ideal, perangai-perangai serta kebiasaan-kebiasaan khas menguasai manusia umumnya, dengan member mereka suatu rasa kesatuan. Dengan kata lain, masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang di bawah tekanan serangkaian kebutuhan dan di bawah pengaruh

seperangkat kepercayaan, ideal dan tujuan, tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama.” (Muthahhari, 1990: 16)

Lebih lanjut, Muthahhari dalam analisisnya atas berbagai pandangan di dunia mengenai masyarakat dan kemudian mengkritisnya dengan mendalam menyimpulkan bahwa manusia merupakan spesies tunggal yang ditahbiskan bersifat kemasyarakatan. Kemasyarakatan tersebut berdasar pada fitrah manusia yang menginginkan kesempurnaan diri. Karenanya adalah sifat manusia itu sendiri yang menentukan jalan yang diambil oleh jiwa bersama. Dengan kata lain, jiwa bersama melayani sifat manusia. Selama manusia itu ada, sifat manusia akan terus aktif, menopang dan memacu jiwa kemasyarakatannya. Jiwa bersama, karena itu, berasal dari jiwa individual. Manusia merupakan spesies tunggal, maka masyarakat manusia pun mempunyai sifat, wujud dan hakikat yang sama. (Muthahhari, 1990: 47)

Dengan asumsi dasar “manusia makhluk bermasyarakat”, maka hal ini juga mengindikasikan bahwa manusia juga berarti makhluk berkebudayaan. Sebab, dalam masyarakat itulah ia berpikir, berkomunikasi, bekerja, dan membangun kebudayaannya. Karena itu, multikulturalisme menjadi urgen sebagai respon terhadap fitrah manusia yang senantiasa ingin hidup bermasyarakat dan berbudaya. Jadi, kebudayaan adalah produk komunitas, yang berarti setiap masyarakat pasti menghasilkan kebudayaan tertentu sesuai dengan tahapan kehidupannya, sehingga ini berarti pula, jika ada sedemikian banyak komunitas masyarakat maka akan tercipta pula beragam kebudayaan. Pada titik ini kita memasuki asumsi kedua dari multikulturalisme.

2. Keragaman adalah realitas kehidupan

Asumsi kedua merupakan tindak lanjut dari asumsi pertama di atas, yakni sebagai masyarakat yang terdiri dari beragam individual dan komunitas yang kemudian menciptakan kebudayaan, maka secara nyata akan muncullah keragaman kebudayaan tersebut. Karena itu, keragaman merupakan realitas nyata di tengah-tengah kehidupan manusia. Manusia secara faktual kita temukan beragam dalam warna kulit, bahasa, suku, ras, budaya, dan juga tentunya agama. Dimanapun kita menemukan komunitas masyarakat, maka di sana kita akan melihat keunikan mereka yang sekaligus membedakan mereka dari yang lainnya. Inilah kemajemukan yang dipersembahkan Tuhan. Negara Indonesia juga tak lepas dari kemajemukan ini. Para peneliti menyebutkan terdapat ratusan bahasa dan suku di Indonesia disamping beberapa perbedaan warna kulit,

adat istiadat, budaya dan agama. Azra memandang bahwa realitas sosial masyarakat Indonesia yang semacam itu sangat sulit dipungkiri dan diingkari. Untuk itu keragaman, atau kebhinekaan atau multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, lebih-lebih lagi pada masa kini, dan di waktu mendatang. Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan, bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Sebaliknya, tidak ada satu negara pun yang mengandung hanya kebudayaan nasional tunggal. Dengan demikian, multikulturalisme merupakan sunnatullah yang tidak dapat ditolak bagi setiap negara-bangsa di dunia ini. (Azra, dalam Baidhawry, 2005: vii)

Keragaman ini mendapatkan legalisasi teologis karena Tuhanlah yang mempersembahkan keragaman tersebut, *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu (manusia) dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertawa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* (Q.S. al-Hujuran:13). Dengan demikian keragaman atau kemajemukan sesuatu yang tak bisa diingkari, karenanya pula multikulturalisme sebagai pengakuan atas keberagaman merupakan hal yang niscaya.

Namun, Muthahhari mengingatkan bahwa keberbedaan manusia bukanlah bersifat esensial melainkan aksidental, sebab yang esensial adalah "kesatuannya/kesamaannya" bukan "keberbedaannya". Muthahhari menjelaskan bahwa masyarakat, peradaban dan budaya kiwari tidak dipandang sebagai dari berbagai spesies, maka tidak dapat disangkal bahwa mereka berbeda bentuk dan warna. Namun, atas dasar teori fitrah manusia dapat dikatakan bahwa masyarakat, budaya dan peradaban sedang menghomogen dan menyatukan diri, dan pada akhirnya akan saling melebur. Masa depan masyarakat manusia terletak pada suatu masyarakat maju, tunggal dan universal, yang di dalamnya seluruh nilai positif manusia akan terjawantahkan. Manusia akan mencapai kesempurnaan sejati dan akhirnya akan mengejawantahkan kemanusiaan sejatiya sendiri. (Muthahhari, 1990 : 50-51)

Kemudian, terkait dengan kenyataan kemajemukan ini, maka keseragaman yang bersifat monokultural dan absolute dianggap sebagai suatu utopia. Di sini muncul suatu persoalan. Yakni persoalan agama. Jika masih menyangkut seputar etnisitas suku, ras, bahasa atau warna kulit, mungkin persoalan multikulturalisme yang menolak

monokulturalisme dan absolutisme tidak menjadi persoalan. Namun, jika telah memasuki ranah agama, maka persoalan ini tidak semudah yang digaungkan. Sebab nalar tentang agama berbeda dengan nalar tentang suku, ras atau warna kulit. Agama bagi penganutnya melampaui semua itu, bahkan semua aktivitas kehidupan manusia harus tunduk di bawah kendali agama. Bahkan suku, ras, kebangsaan, warga negara dan lainnya tidak dapat menghalangi kesatuan manusia dalam agama secara universal. Lebih dari itu agamalah sarana utama manusia menuju kesempurnaan dirinya.

Allamah Thabathaba'i dalam tafsirnya *al-Mizan* menjelaskan bahwa Islam telah menghapus peran perbedaan kesukuan dan kebangsaan, dan menolak peran efektif apapun dari mereka dalam evolusi (struktur) masyarakat manusia. Ada dua faktor menurut Thabathaba'i, yang menyebabkan pembagian-pembagian ini. *Pertama*, kehidupan primitif kesukuan yang berdasarkan pada hubungan keturunan; dan *kedua*, keragaman geografis dan regional. Kedua faktor tersebut bertanggungjawab atas pembagian umat manusia menjadi berbagai bangsa dan suku, sehingga menimbulkan perbedaan ras, bahasa, dan warna kulit. Kedua faktor ini pula yang menyebabkan kesetiaan kepada suatu kawasan tertentu; setiap bangsa menyebut wilayahnya sebagai tanah airnya dan siap membelanya. Meski dorongan alamiah manusia menjadikan manusia ingin diakui sebagai bagian dari kelompoknya, namun pada saat yang sama, manusia mesti hidup sebagai suatu 'keseluruhan' atau sebagai suatu kesatuan tunggal. Dan yang mempersatukan itu, bagi Thabathaba'i, adalah agama (lihat Muthahhari, 1990:52-53).

Murtadha Muthahhari yang merupakan murid utama Thabathaba'i lebih jauh menegaskan bahwa ajaran Islam menekankan ketunggalan mutlak agama, dan memandang bahwa perbedaan dalam tata dan tradisi keagamaan bersifat sekunder, tak hakiki dan tak primer. Kita juga tahu bahwa agama hanyalah suatu program untuk menyempurnakan individu dan masyarakat. Islam juga mengungkapkan bahwa dasar ajaran-ajaran ini ialah bahwa masyarakat itu tunggal. Al-Quran berulang kali menekankan bahwa hanya ada satu keimanan dan agama tunggal di seluruh dunia dan sepanjang masa. Menurut al-Quran hanya ada satu 'agama'. Semua Nabi telah mengkhutbahkan dan mengajarkan satu keimanan, satu jalan, dan satu tujuan, "Dia telah menyariatkan bagi kamu agama yang telah disariatkan-Nya kepada Nuh, dan telah Kami wahyukan kepadamu dan yang telah Kami syariatkan atas Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya... (Q.S. 42:

13). Banyak ayat al-Quran membuktikan bahwa agama senantiasa satu di sepanjang zaman, di seluruh kawasan, dan di seluruh kitab suci semua nabi Allah. Perbedaannya hanya terletak pada aturan-aturan tertentu, menurut tahap-tahap relative perkembangan atau keterbelakangan masyarakat. Logika bahwa pada hakikatnya hanya ada satu agama, didasarkan pada pandangan tentang manusia dan masyarakat bahwa manusia itu satu dan merupakan satu spesies tunggal, dan bahwa manusia tidak berbeda dalam hal hakikat kemanusiaan. Begitu pula, masyarakat manusia, sebagai suatu entitas objektif, mencerminkan suatu spesies tunggal, bukan kemajemukan jenis. (Muthahhari, 1990: 49)

Jika kita mencermati analisis Muthahhari di atas, maka multikulturalisme akan kehilangan relevansinya dalam konsepsi sosial universalitas dan absolusitas agama. Sebab analisis social-filosofis Muthahhari menekankan bahwa pada puncaknya nanti agama yang benar akan menjadi pemenang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta melenyapkan kekafiran dan kezaliman. Jadi agama hanya satu. Akan tetapi persoalan ini bisa ditafsirkan secara berbeda. Salah seorang kolega Muthahhari yaitu Prof. Misbah Yazdi menjelaskan bahwa maksud dari penghapusan kekafiran dan kemusyrikan tidak berarti bahwa semua manusia di muka bumi ini menjadi monoteis murni—karena kekafiran dan kemusyrikan tidak akan sirna dengan paksaan, sebagaimana iman dan kepercayaan tidak mengisi hati dengan paksaan—tetapi maksudnya ialah system pemerintahan yang berlaku di seluruh dunia adalah sistem pemerintahan Ilahi yang monoistik dan semata-mata bersumber dari Tuhan (Yazdi, 2006: 169)

Memang, tidak dapat dipungkiri umat manusia terdiri dari beragam suku, ras, bahasadari, dan juga agama, baik itu secara esensial maupun aksidental. Tetapi bukan ini yang menjadi persoalan dalam multikulturalisme. Fokus utama multikulturalisme adalah bagaimana kita memandang keberagaman yang faktual itu? Apakah kita menerimanya secara positif atau secara negative? Apakah kita memandang keragaman sebagai mosaik keindahan untuk saling berbagi atau sebagai mosaik untuk saling menguasai?

3. Potensi konflik dalam kemajemukan

Konflik dan kekerasan adalah istilah yang paling laris “dijual” oleh pengusung multikulturalisme. Mereka berasumsi bahwa, kemajemukan yang ada di tengah-tengah masyarakat sangat rawan konflik dan dapat berimplikasi pada tindakan kekerasan. Hal ini terjadi, disebabkan setiap sistem kultural pada masyarakat majemuk mempertahankan

egosentrisme dan berusaha mendominasi lainnya. Pada titik ini, antara kebudayaan yang satu dengan lainnya akan terjadi persaingan yang tidak sehat sehingga perbedaan yang seharusnya membuat masyarakat saling mengenal, berubah menjadi saling memenggal. Konflik ini semakin melebar jika disusupi oleh kepentingan politik-kekuasaan dan mungkin juga ekonomis yang berakibat pada tindakan kerusuhan berskala luas hingga perang saudara. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak berjalannya proses pembauran dalam teori *melting pot*.

Proses pembauran masyarakat majemuk yang tidak sempurna akan menimbulkan ketegangan yang secara potensial menyimpan bara konflik yang amat dahsyat. Tidak tuntasnya hakikat bermasyarakat dalam suasana keragaman menyebabkan makin terpeliharanya sekat sosial antar warga, baik secara psikologis, budaya, politis dan sebagainya. Pada gilirannya, hal tersebut akan mempermudah meledaknya persinggungan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, kekuatan politik tertentu seolah-olah diberi kesempatan sekaligus mendapat "pembenaran" untuk—meski secara tertutup—melahirkan konflik dengan mengatasnamakan simbol-simbol ikatan primordial masing-masing kelompok. Pembauran sosio-kultural yang terhambat untuk menemukan esensi hidup dalam keberagaman tadi tergambar pada bergesernya pertengakaran warga karena persoalan kebun, ke arah perang kelompok dengan sentimen keagamaan. Jelas sentimen keagamaan muncul belakangan, akan tetapi potensi konfliknya sudah terpelihara sejak lama. (al-Mandari, 2002: 132)

Model konflik seperti ini jika dianalisis merupakan warisan kolonialisme. Mengambil analisis Chandra Muzaffar bahwa epos kolonial yang dicirikan dengan dominasi menyebabkan lebih banyak ketegangan dan tekanan terhadap hubungan antar masyarakat dan antar kebudayaan. Negara manapun baik Inggris, Belanda, atau Perancis, sebagai kolonial, kebijakannya selalu berupaya untuk "memecah belah dan menguasai". Untuk itu, ia akan mengadu domba antara satu agama dengan agama lainnya, atau daerah dengan daerah lainnya, atau satu etnis dengan etnis lainnya. Misalnya, umat Hindu diadu dengan umat Muslim di India yang dijajah Inggris, orang Jawa dengan orang Sumatera di Indonesia yang dijajah Belanda, orang Khmer dengan orang Vietnam di Indo-Cina yang dijajah Perancis. Kebijakan yang mereka ciptakan dalam kaitannya dengan tanah, pertanian, pekerjaan, layanan public dan pendidikan ditujukan untuk memperlebar jurang di antara berbagai masyarakat (Muzaffar, 2002: 66)

Selain dari kebijakan di atas, masih menurut Muzaffar, terdapat pula kebijakan warisan kolonial yang dilakukan oleh masyarakat elit (pemerintah) saat ini yang memberikan kontribusi negative terhadap etnis. Yaitu "import" tenaga kerja imigran untuk bekerja di sector-sektor ekonomi tertentu sehingga menciptakan kantong-kantong suku yang terpisah dan berbeda dari masyarakat pribumi. Karena dikotomi ekonomi dan politik yang membagi imigran dan masyarakat pribumi begitu parah, maka permasalahan komunal yang terkait dengan kedua kelompok ini sering terabadikan sampai saat ini (Muzaffar, 2002: 66). Kasus warga keturunan cina (Tionghoa) di Indonesia mungkin bisa dijadikan *ibrah* dalam masalah ini.

Paling tidak ada tiga kelompok sudut pandang yang biasa berkembang dalam menyikapi perbedaan identitas kaitannya dengan konflik yang sering muncul. **Pertama**, pandangan primordialis. Kelompok ini menganggap, perbedaan-perbedaan yang berasal dari genetika seperti suku, ras (dan juga agama) merupakan sumber utama lahirnya benturan-benturan kepentingan etnis maupun agama. **Kedua**, pandangan kaum instrumentalis. Menurut mereka, suku, agama dan identitas yang lain dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil. Konsepsi ini lebih banyak digunakan oleh politisi dan para elit untuk mendapatkan dukungan dari kelompok identitas. Oleh karena itu, selama setiap orang mau mengalah dari preference yang dikehendaki elit, selama itu pula benturan antar kelompok identitas dapat dihindari bahkan tidak terjadi. **Ketiga**, kaum konstruktivis, yang beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialis. Etnisitas, bagi kelompok ini, dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Karenanya, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugerah dan perbedaan adalah berkah. Dalam konteks pendapat yang ketiga, terdapat ruang wacana tentang multikulturalisme dan pendidikan multikultural sebagai sarana membangun toleransi atas keragaman (Mahfud, 2009: 89-90).

Jadi, mengingat dahsyatnya konflik yang akan muncul itulah maka multikulturalisme menjadi keniscayaan yang harus disebarkan dan dijadikan acuan untuk membudayakan penghormatan pada perbedaan dan kesederajatan dalam kemajemukan. Tentu saja penyebaran itu akan cukup efektif jika melalui dunia pendidikan. Inilah pentingnya pendidikan multikultural. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Musa Asy'ari

bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak. Dalam konteks Indonesia, yang dikenal dengan muatan yang sarat kemajemukan, maka pendidikan multicultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan". (Asya'ri, 2004)

Namun menjadikan kemajemukan sebagai penyebab konflik adalah terlalu tergesa-gesa. Kemajemukan yang ada di masyarakat bukanlah bersifat statis dan tertutup serta tak mengalami perubahan. Rajab (1996: 6-7) mengemukakan beberapa studi yang menunjukkan bahwa ikatan-ikatan primordialisme tidak begitu signifikan dalam mendorong timbulnya gerakan-gerakan separatis. Meskipun gerakan-gerakan tersebut timbul di beberapa daerah dan dilakukan oleh suku bangsa atau golongan agama tertentu, agaknya dapat diidentifikasi bahwa yang menjadi penyebab utama munculnya adalah reorganisasi tentara dan pemerintahan, serta terjadinya sentralisasi politik dan ekonomi pada tangan pemerintah pusat. Banyak bukti empiris yang membuktikan bahwa pluralitas atas dasar ikatan-ikatan primordial tersebut bisa diatasi. Sebagai contoh kecil namun berarti, Mohammad Yamin adalah orang Minangkabau, tetapi dia kagum pada budaya Jawa dan bisa menulis kebesaran kebudayaan Jawa. Dari kasus ini kita mengambil pelajaran bahwa kebudayaan bukan suatu yang tertutup, yang tak bisa berubah, bahkan pada kenyataannya kebudayaan memang senantiasa mengalami perubahan, tidak tertutup dan statis, sehingga kebudayaan yang satu dengan yang lainnya bisa saling berkomunikasi dan berbaur, bahkan dalam proses hubungan (*cultural contact*) tersebut bisa saja tumbuh dan berkembang suatu kebudayaan baru, suatu bentuk budaya hasil proses akulturasi.

Lebih jauh, Rajab menganalisis bahwa konflik SARA yang terjadi antara kaum pribumi dan nonpribumi lebih banyak disebabkan oleh adanya ketimpangan ekonomi dan partisipasi politik, bukan karena faktor perbedaan kebudayaan. Jadi, yang dipersoalkan dalam proses integrasi masyarakat majemuk, bukan terletak pada kemajemukan kebudayaan, tetapi pada sector ekonomi dan politik. Atau mungkin konsep yang lebih tepat, perbedaan kebudayaan merupakan sesuatu yang laten yang dapat mendestabilkan

integrasi masyarakat, tetapi sifat laten itu tidak akan muncul ke permukaan bila sistem ekonomi dan sistem politik bersifat demokratis. Faktor perbedaan kebudayaan yang laten itu akan muncul ke permukaan dan menimbulkan konflik bila sistem ekonomi mengalami distorsi yang berlebihan dan sistem politik kurang partisipatif. Jadi sector ekonomi dan politik inilah yang sebagian besar menjadi pemicu berlangsungnya konflik dalam masyarakat majemuk, baik antar agama, suku bangsa, daerah, maupun antara golongan minoritas dan golongan mayoritas (Rajab, 1996: 7-8).

Hal ini juga diperkuat oleh analisis Usman Pelly tentang konflik ganda. Menurut Pelly, kemajemukan akan menjurus ke arah instensitas konflik yang sangat potensial, apabila factor kemajemukan horizontal bersatu dengan factor kemajemukan vertical pada kelompok-kelompok atau inividu-individu. Dengan kata lain, apabila misalnya suatu kelompok etnis tertentu tidak hanya dibedakan dengan kelompok etnis lainnya karena factor-factor horizontal seperti bahasa daerah, agama, dan lainnya, tetapi juga karena perbedaan factor vertical seperti ekonomi, pendidikan, pemukiman dan kedudukan sosio-politik, maka kualifikasi kemajemukan antara kedua kelompok tersebut menjadi berganda yaitu horizontal dan vertical. Dengan kata lain, perbedaan cultural antara kedua kelompok tersebut menjadi sangat signifikan (berarti). Dalam keadaan seperti ini, intensitas (potensi) konflik antara kedua kelompok itu akan lebih mudah menjurus ke arah suasana permusuhan (konflik terbuka). Sebaliknya, apabila kemajemukan factor-factor horizontal tidak diperkuat (berhimpit) dengan factor-factor vertical, maka intensitas potensi konflik akan menjadi sangat lemah dan mudah dijuruskan ke arah persesuaian, harmoni dan keserasian social (Pelly, 1993: 190-191)

Yang dapat kita simpulkan dari analisis di atas adalah bahwa kemajemukan kultural yang bersifat primordialisme atau juga horizontal tidaklah secara linier menghasilkan konflik. Antara satu suku dengan suku lainnya tidaklah berkonflik karena perbedaan suku, begitu pula antara satu agama dengan agama lainnya, tidaklah membuat konflik karena perbedaan agama tersebut. Tetapi konflik yang timbul cenderung disebabkan oleh persoalan politik dan ekonomi. Namun, tak bisa pula dihindari, adakalanya persoalan politik dan ekonomi tersebut melibatkan unsur-unsur primordialisme pula. Karena itu, suatu kesia-siaan jika multikulturalisme hanya diarahkan pada kemajemukan kultural yang bersifat primordialisme dengan melupakan unsur-unsur yang non-primordialisme.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa multikulturalisme merupakan konsep yang sangat terbuka untuk ditelusuri secara maknawiah . berbagai gagasan untuk mendefenisikannya merupakan ladang yang subur untuk dicermati dalam menemukan satu konsep yang ilmiah . Terbukanya pendefinisian konsep multikulturalisme paling tidak menunjukkan bahwa diskursus tentang tema ini berlanjut , ada berbagai kriteria yang dimunculkan untuk sampai kepada suatu defenisi seperti multikulturalisme itu merupakan different ,equality ,equity , bahkan merupakan suatu idiologi . Dari jenis saja multikulturalisme itu dapat dibedakan dalam bentuk isolasionisme , akomodatif , otonomis, interaktif , kosmopolitan . Dari kriteria dan jenis yang beragam sudah menunjukkan bahwa multikulturalisme itu dalah sesuatu yang beragam itu sendiri jadi tidak ada pendefinisian yang rigid untuk menetapkan pengertian konsep ini secara tetap . Secara umum dapat didefenisikan multikulturalisme adalah suatu pemikiran yang menjunjung tinggi adanya keberagaman budaya dan dalam keberagaman itu akan tumbuh dan berkembnang berbagai potensi yang berdaya dorong potip dan negatip dalam kehidupan bersama yang menjadi cirri khas masyarakat .

UNIMED

THE
Character Building
UNIVERSITY

DAFTAR BACAAN

- al-Mandari, Syafinuddin. 2002. *Pluralisme Agama dan Masa Depan Masyarakat Sipil di Indonesia*. Dalam Jurnal al-Huda Vol. II No. 7. Jakarta: al-Huda.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta : Erlangga.
- Fauzi, Ihsan Ali.; Syafiq Hasyim.; J.H. Lamardy (ed). 2007. *Demi Toleransi Demi Pluralisme*. Jakarta: Paramadina.
- Jenks, Chris. 2008. *Kebudayaan*. Medan: Bina Media Perintis.
- Koentjaraningrat. 1975. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Musa, Asya'ri. 2004. *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa*. Harian Kompas. 03 September 2004.
- Muzaffar, Chandra. 2002. *Multi Peradaban-Asia: Janji dan Bahayanya*. Dalam Jurnal al-Huda Vol. II, No. 6. Jakarta: al-Huda.
- Mahfud, Choirul. 2009. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muthahhari, Murtadha. 1990. *Masyarakat dan Sejarah : Kritik islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*. Bandung: Mizan.
- Pelly, Usman. 1993. "Pengukuran Intensitas Potensi Konflik dalam Masyarakat Majemuk". Dalam Analisis CSIS.
- Rajab, Budi. 1996. "Pluralitas Masyarakat Indonesia Suatu Tinjauan Umum". Dalam Prisma No. 6. Juni 1996.
- Suparian, Parsudi. 2002. *Menuju Masyarakat Multikultural*. Makalah dalam simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia di Bali ke-3 : *Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika : Menuju Masyarakat Multikultural*". Bali, Universitas Udayana, 16-19 juli 2002. Dimuat juga di dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 69.
- Tilker, H.A.R. 2002. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilker, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme : Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Grasindo.
- Tilker, H.A.R. 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taylor, Charles. 1994. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press.